

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA LINGKUNGAN OLEH PENGURUS KORPORASI DI INDONESIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF KEADILAN (Studi Putusan Nomor 9/Pid.B/LH/2021/PN Sak)

Ishma Safira (2310623035), Handoyo Prasetyo, Heru Sugiyono

Penegakan hukum terhadap tindak pidana lingkungan oleh korporasi di Indonesia masih menghadapi persoalan serius, terutama terkait kepastian dan keadilan hukum dalam pertanggungjawaban pidana pengurus korporasi. Permasalahan ini disebabkan oleh kekosongan hukum mengenai parameter sanksi, baik terhadap entitas korporasi maupun pengurusnya. Penelitian ini bertujuan menganalisis penegakan hukum dalam kasus tindak pidana lingkungan oleh pengurus korporasi dan mengkaji parameter pertanggungjawaban pidana dari perspektif keadilan. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus, khususnya Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 9/Pid.B/LH/2021/PN Sak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum masih belum konsisten, karena pedoman teknis seperti Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 bersifat tidak mengikat sehingga pedoman tersebut tidak selalu dijadikan acuan oleh hakim. Selain itu, masih terdapat kekosongan hukum terkait parameter yang adil dalam penjatuhan pidana denda terhadap pengurus korporasi, yang menimbulkan pertanyaan serius mengenai keadilan penerapannya. Oleh karena itu, perlu adanya revisi regulasi yang menetapkan pedoman sanksi secara jelas dan proporsional terhadap pengurus korporasi guna mencegah disparitas dan menjamin keadilan hukum.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Lingkungan, Pengurus Korporasi, Keadilan.

ABSTRACT

ENVIRONMENTAL CRIMINAL LIABILITY BY CORPORATE MANAGEMENT IN INDONESIA REVIEWED FROM THE PERSPECTIVE OF JUSTICE

(Study of Decision Number 9/Pid.B/LH/2021/PN Sak)

Ishma Safira (2310623035), Handoyo Prasetyo, Heru Sugiyono

The enforcement of environmental criminal law against corporations in Indonesia still faces serious challenges, particularly in terms of legal certainty and justice concerning the criminal liability of corporate executives. This issue arises from a legal vacuum regarding clear sanction parameters, both for the corporate entity and its executives. This research aims to analyze law enforcement against corporate executives in environmental crime cases and to examine the parameters of criminal liability from a justice perspective. The method used is normative juridical, employing statutory and case study approaches, specifically the District Court Decision of Siak Sri Indrapura Number 9/Pid.B/LH/2021/PN Sak. The findings reveal that law enforcement remains inconsistent, as technical guidelines such as Minister of Environment Regulation Number 7 of 2014 are non-binding and thus not consistently used as a reference by judges. Furthermore, the absence of fair parameters for imposing criminal fines on corporate executives leads to disparities in sentencing. Therefore, a reformulation of regulations is needed to establish clear, measurable, and proportionate sanction guidelines to prevent disparities and uphold legal justice in environmental law enforcement.

Keywords: *Criminal Liability, Environment, Corporate Management, Justice.*